

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

BAB I PENDAHULUAN..... 2

1.1. Latar Belakang..... 2

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Hubungan antar dokumen 3

1.3. Maksud dan Tujuan..... 4

1.4. Sistematika Penulisan..... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 6

2.1. Review Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya..... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD..... 9

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 11

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 12

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 13

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 16

4.1 Program dan Kegiatan Tahun Rencana Target Pagu Anggaran.....16

BAB IV PENUTUP17

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa SKPD wajib menyusun Rencana kerja SKPD (Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Perubahan Renja Bagian Organisasi Setda Tahun 2019 mengacu pada perubahan asumsi ekonomi daerah, ditetapkannya perubahan RKPD tahun 2019, Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Setda tahun 2018 - 2023. Disamping itu, penyusunan Perubahan Renja ini juga didasarkan pada penyesuaian belanja wajib mengikat (PAK)

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan

- dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
 18. Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 19. Perbup 30 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2019.
 20. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor : 050/1092/403.202/2019 Tentang Penyampaian Rancangan Perubahan RKPD Kab Magetan Tahun 2019 Dan Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan Perubahan Renja 2019 Bagian Organisasi mengacu dengan Perubahan RKPD, KUPA dan PPAS Perubahan, serta perubahan rancangan APBD Pemerintah Kabupaten Magetan

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian dengan Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seiring dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
2. Mengevaluasi capaian indikator kinerja Renstra Bagian Organisasi Setda ;
3. Mereview, menyesuaikan dan mempertajam target-target kinerja Bagian Organisasi;
4. Menetapkan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah :

5. Memberikan pedoman bagi seluruh unit di Bagian Organisasi Setda dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran Renstra;

1.5. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Bagian Organisasi Setda Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang disusunnya Renja SKPD tahun 2019, Dasar hukum, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja SKPD serta Sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2016 dan 2017 dan Perkiraan Capaian Renstra PD sampai dengan tahun 2018, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang program dan kegiatan tahun rencana, target capaian kinerja beserta pagu idikatifnya.

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Tahun 2019 merupakan periode awal Renstra tahun 2019. Oleh karena itu, pada sub bab ini hanya akan diuraikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun 2019, dikaitkan dengan target capaian Renstra.

Proyeksi terhadap hasil pelaksanaan Renja Bagian Organisasi Setda tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Proyeksi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi target kinerja hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
	5	6	7	8	9	10	11=(10/9)	12	13=(8+10+12)	14=(13/7)
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	SOTK yang sesuai peraturan dan kebutuhan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100 %
	Kegiatan : Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	SKPD yang SO difasilitasi peningkatan kapasitasnya	283 SKPD	185 SKPD	57 SKPD	57 SKPD	100	56 SKPD	298 SKPD	104,3
	Kegiatan : Fasilitas monitoring dan evaluasi tupoksi organisasi perangkat daerah	SKPD yang tuposiknya difasilitasi peningkatan kapasitasnya	285 SKPD	185 SKPD	57 SKPD	57 SKPD	100	56 SKPD	298 SKPD	104,3
	Program : pembinaan dan pengembangan aparatur	Prosentase peningkatan pembinaan dan pengembangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
	Kegiatan : Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah SKPD yang berhasil disusun informasi jabatan	285 SKPD	185 SKPD	57 SKPD	57 SKPD	100	56 SKPD	298 SKPD	104,3
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pelaksanaan monev	285 SKPD	185 SKPD	57 SKPD	57 SKPD	100	56 SKPD	298SKPD	104,3

				Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	80 %	80 %	80 %	80 %	80	90 %	85 %	90 %
				Kegiatan : Fasilitasi Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelaksanaan BinteK/ gelar KBK	15 Kali/SKPD	10 Kali/SKPD	3 Kali/SKPD	3 Kali/SKPD	100	3 Kali/SKPD	16	102,2
				Program ; Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase penyelesaian laporan kinerja dan keuangan	85 %	75 %	75 %	75 %	100	80 %	75 %	85
				Kegiatan : Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen terkait SAKIP, Jumlah Raperbup Pelayanan Publik, Jumlah dokumen reformasi birokrasi	15 buah	15 buah	5 buah	5 buah	100 %	5 buah	25	102,2
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya peralatan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
				Kegiatan : Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	Pengadaan ATK, SPPD, Material dan Publikasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
				Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya	Jumlah pengadaan Laptop, LCD dan printer	6 laptop, 1 LCD, 1PC, 4 Printer	2 laptop, 1 PC, 2 Printer	2 laptop, 1 LCD	2 Laptop, 1 LCD	100 %	2 Laptop 3 Printer	6 laptop, 1 LCD, 1 PC, 5 Printer	100 %
				Program : Mengintensifkan penanganan pengaduan kepada masyarakat	Nilai SKM	76,5	70,1	76,00	76,05	100 %	76,3	76,002	98,8
				Kegiatan : Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dokumen SKM	5 dokumen	5	1	1	100 %	1	7	100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja Bagian Organisasi Setda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKK maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra Bagian Organisasi Setda Tahun 2013-2018 berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Bagian Organisasi Setda serta norma dan standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan terkait kinerja pelayanan urusan perencanaan pembangunan. Hasil analisis kinerja pelayanan Bagian Organisasi Setda sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magetan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah SKPD yang menyusun LAKIP dan Penetapan Kinerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku			45	45	45	45	45	45	45	45	
2	Prosentase Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD dengan nilai rata-rata nilai baik			80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	
3	Jumlah SKPD yg dinilai baik yang berhasil difasilitasi mengikuti pameran pelayanan public tingkat propinsi atau nasional			2	2	2	2	2	2	2	2	
4	Jumlah SKPD yang dinilai baik yang berhasil difasilitasi untuk mengikuti penilaian unit pelayanan percontohan Tkt Jawa Timur			2	2	2	2	2	2	2	2	
5	Prosentase Jumlah SKPD yang berhasil telah menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan kualifikasi baik ;			75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	
6	Jumlah SKPD yang dinilai baik yang berhasil difasilitasi mengikuti Gelar Budaya Kerja tingkat propinsi/ nasional			15	15	15	15	15	15	15	15	
7	Prosentase SKPD/SOTK yang berhasil disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditentukan			75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	
8	Jumlah SKPD yang berhasil difasilitasi untuk menetapkan SPM dengan Peraturan Kepala Daerah			-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Jumlah SPP SKPD/Unit Pelayanan yang berhasil ditetapkan dengan Peraturan Kepala			-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Jumah SOP (Standar Operating Procedure) SKPD/Unit Pelayanan yang berhasil disusun			-	-	-	-	-	-	-	-	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tugas dan fungsi utama dari Bagian Organisasi Setda adalah melaksanakan penyiapan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Kelembagaan dan kepegawaian, Pembinaan Pendayagunaan Aparatur Negara serta Analisis Jabatan dan Formasi Jabatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magetan mengalami beberapa permasalahan bagi perwujudan visi dan pengembangan misi sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya koordinasi antar stake holder terkait dalam penataan dan pembentukan kelembagaan ;
- b. Penerbitan peraturan perundang-perundangan yang tumpang tindih antar kementerian yang membuat pelaksana di daerah kesulitan dalam mengimplementasikan penataan kelembagaan dan analisa jabatan ;
- c. Kinerja pelayanan publik yang masih belum bisa memuaskan pengguna jasa pelayanan, terutama warga masyarakat, pelaku bisnis dan para investor. Hal ini terkait dengan prosedur dan tata cara pelayanan yang belum mengarah kepada penerapan konsep “One-Stop Service” karena memang dalam pelaksanaannya masih terkesan birokratis, persyaratan yang berbelit-berlit dan lamanya waktu yang diperlukan tidak tetap serta biaya pelayanan yang tidak pasti ;
- d. Penilaian masyarakat terhadap lemahnya citra birokrasi lebih disebabkan oleh faktor sumber daya aparatur yang tidak profesional dalam pelayanan dengan didukung sistem administrasi yang tidak terstruktur. Manajemen pemerintahan yang baik harus didukung dengan standar baku operasional yang sering kita kenal dengan standard operating procedure (SOP).

2.4. **Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019**

Reviu terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan SKPD, terutama terkait dengan hasil analisis kinerja pelayanan yang tidak berhasil atau kurang maksimal, sehingga perlu mendapatkan pendanaan yang lebih besar atau merubah jenis kegiatan agar dicapai hasil yang optimal. Reviu juga dilakukan terhadap program/kegiatan yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau ketidak sesuaian program/kegiatan maupun besarannya.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel II.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Kabupaten Magetan

Nama SKPD : Bagian Organisasi Setda

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Pagu indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bln	140.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bln	140.000.000	
2	Survey kepuasan masyarakat		Jumlah Dokumen	2 dokumen	30.000.000	Survey kepuasan masyarakat		Jumlah Dokumen	2 dokumen	30.000.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	
3	Kegiatan Pengadaan perlengkapan kantor		Jumlah pengadaan laptop	1 buah	8.000.000	Kegiatan Pengadaan perlengkapan kantor		Jumlah pengadaan laptop	1 buah	8.000.000	
	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
4	Kegiatan Fasilitasi SOTK Perangkat daerah		Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi SOTK	10 Perangkat Daerah	150.000.00	Kegiatan Fasilitasi SOTK Perangkat daerah		Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi SOTK	10 Perangkat Daerah	150.000.00	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
5	Kegiatan Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS		Jumlah Perangkat daerah/Unit kerja yang dianalisis	56 Perangkat daerah	98.000.000	Kegiatan Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS		Jumlah Perangkat daerah/Unit kerja yang dianalisis	56 Perangkat daerah	98.000.000	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				-	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				-	
6	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	4 Kegiatan	185.000.000	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	4 Kegiatan	185.000.000	
	Program Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan					Program Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan					

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Pagu indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	
7	Pengembangan ketatalaksanaan		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	48.000.000	Pengembangan ketatalaksanaan		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	48.000.000	
	<i>Program Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah</i>					<i>Program Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah</i>					
8	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen LkjlP dan PK Kabupaten	2 Dokumen	190.000.000	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen LkjlP dan PK Kabupaten	2 Dokumen	190.000.000	
9	Budaya kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Perangkat daerah yang terfasilitasi penyusunan Risalah Budaya kinerja dengan baik dan benar		99.000.000	Budaya kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Perangkat daerah yang terfasilitasi penyusunan Risalah Budaya kinerja dengan baik dan benar		99.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam tahun 2019 ini tidak terdapat program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan Bagian Organisasi Setda, sehingga Renja Bagian Organisasi Setda tahun 2019 murni merupakan program/kegiatan yang sudah direncanakan sesuai Renstra Tahun 2013 - 2018 dengan penyesuaian rincian sub kegiatan beserta targetnya.

Tabel II.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kabupaten Magetan

Nama SKPD : Bagian Organisasi Setda

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Nihil		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERAGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan

Dengan memperhatikan pada :

- a. Hasil review terhadap pelaksanaan Renja tahun 2018;
- b. Hasil analisis kinerja pelayanan SKPD tahun 2018;
- c. Hasil review terhadap rancangan RKPD tahun 2018;
- d. Hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi; serta
- e. isu-isu/permasalahan penting yang dihadapi SKPD selama tahun 2018 dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,

Dari hal-hal diatas, kemudian disandingkan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam Perubahan Renstra Bagian Organisasi Setda tahun 2013 - 2018, maka program/kegiatan yang akan dilaksanakan Bagian Organisasi Setda pada tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut berikut :

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2				3	4	6	7	8	9	10	11	12
	4				Fungsi Penunjang Urusan				942.000.000,00				1.023.000.000,00
	4.01				Administrasi Pemerintahan				942.000.000,00				1.023.000.000,00
	4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM		78 Nilai	170.000.000,00			78 Nilai	140.000.000,00
1	4	01	01	020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 Bulan	140.000.000,00	DAU			140.000.000,00
	4	01	01	028	Suevey Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	Kec Magetan	78 score	30.000.000	PAD		78 Score	30.000.000,00
	4	01	27		Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Presentase perangkat daerah yang dievaluasi kelembagaannya		30%	140.000.000,00			30%	150.000.000,00
2	4	01	27	008	Fasilitasi Pemantapan SOTK Perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi SOTK	Kabupaten	10 Perangkat Daerah	140.000.000,00	PAD			150.000.000,00
	4	01	47		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Perangkat daerah yang memiliki analisis jabatan yang baik		50%	70.000.000,00			50%	100.000.000,00
3	4	01	47	006	Penyusunan Instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah Perangkat Daerah/Unit kerja yang dianalisis	Kabupaten	55 Perangkat Daerah	70.000.000,00	PAD		55 Perangkat Daerah	100.000.000,00
	4	01	68		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase perangkat daerah yang pengelolaan pelayanan publik sesuai dengan standart		35%	130.000.000,00			35%	185.000.000,00
4	4	01	68	002	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen pelayanan publik yang disusun	Kabupaten	3 Dokumen	130.000.000,00	PAD		3 Dokumen	185.000.000,00
	4	01	70		Program Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan	Presentase SKPD yang meningkat ketatalaksanaan baik		50%	83.000.000,00			50%	48.000.000,00
5	4	01	70	001	Pengembangan Ketatalaksanaan	Jumlah dokumen ketatalaksanaan yang disusun	Kabupaten	2 Dokumen	83.000.000,00	PAD		2 Dokumen	48.000.000,00

	4	01	81		Program Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	Capaian Laporan hasil evaluasi AKIP komponen pelaporan kinerja		9,5 Nilai	379.000.000,00			9,5 Nilai	400.000.000,00
6	4	01	81	001	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Anggaran dan Pelaporan Kinerja	Kabupaten	15 Dokumen	190.000.000,00	PAD		15 Dokumen	200.000.000,00
7	4	02	81	002	Budaya Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi penyusunan Risalah Budaya Kinerja dengan baik dan benar	Kabupaten	12 Perangkat Daerah	89.000.000,00	PAD		12 Perangkat Daerah	100.000.000,00
10	4	02	81	003	Pengembangan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen RB yang tersusun	Kabupaten	2 Dokumen	100.000.000,00	APBD			100.000.000,00
					TOTAL				942.000.000,00	APBD			1.023.000.000,00

